



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jalan Onje Nomor 4 Purbalingga 53311 Jawa Tengah
Telepon (0281) 891098, 893116, 896216 Faks. (0281) 893116
E-mail : bakeuda@purbalinggakab.go.id, bakeuda.purbalinggakab@gmail.com

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 – 2029**

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	BADAN KEUANGAN DAERAH
URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN	:	5.02 KEUANGAN
TUGAS	:	Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
FUNGSI	:	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Keuangan; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Keuangan; e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTB; g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Tujuan :		
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Barang Milik Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu • Formulasi Pengukuran: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> $(Ax15)+(Bx20)+(Cx15)+(Dx20)+(Ex15)+(Fx15)$ </div> <p>Ket:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, Bobot = 15; B. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, Bobot = 20;

MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<p>C. Transparansi pengelolaan keuangan daerah, Bobot = 15; D. Penyerapan anggaran, Bobot = 20; E. Kondisi keuangan daerah, Bobot = 15; dan F. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD, Bobot - 15.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Satuan : Angka • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Perangda Penanggungjawab: Badan Keuangan Daerah • Sumber Data : SK Mendagri tentang hasil IPKD
Sasaran 1 :		
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Pendapatan Daerah, sedangkan dengan meningkatnya Pendapatan Daerah maka akan meningkatkan Penerimaan Daerah yang dapat dipergunakan untuk membiayai Pembangunan Daerah. • Formulasi Pengukuran: Data Realisasi • Satuan Rupiah • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Perangda Penanggungjawab: Badan Keuangan Daerah • Sumber Data : Laporan Realisasi Rincian Pendapatan Asli Daerah
Sasaran 2 :		
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Efektif dan Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	Status Opini BPK terhadap LKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Opini BPK merupakan instrumen yang sudah berlaku umum (<i>generally accepted</i>) yang digunakan untuk mengukur dan menilai kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah, mulai dari proses penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban yang meliputi 4 (empat) kriteria, yaitu: 1. Kesesuaian dengan Standar Akutansi Pemerintahan;

MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		2. Kecukupan Pengungkapan; 3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- Undangan; dan 4. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern. • Formulasi Pengukuran : <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <i>Release Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</i> </div> • Satuan : Level • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Perangda Penanggungjawab : Badan Keuangan Daerah • Sumber Data : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Sasaran 3 :		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAKEUDA	Nilai SAKIP BAKEUDA	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator nilai SAKIP mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan serta menjadi dasar evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan • Formulasi Pengukuran: <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <i>Release LHE SAKIP dari Inspektorat</i> </div> • Satuan : Angka • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Perangda Penanggungjawab: Badan Keuangan Daerah • Sumber Data : LHE SAKIP dari Inspektorat

Purbalingga, 05 Januari 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



IMAM KHASBULAH, S.Sos., M.E.

Pembina, IV/a

NIP. 197210141992031004